

Dampak Jaminan terhadap Peluang Memperoleh Kredit bagi UMKM di Sumatera Barat

Collateral Effect to Bank Loan Probability for Microenterprises in West Sumatera

Joan Marta^{a,*}, Doni Satria^{a,**}

^aProgram Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

[diterima: 30 Agustus 2013 — disetujui: 29 Agustus 2016 — terbit daring: 31 Oktober 2016]

Abstract

This paper reveals that West Sumatera banking sector are more likely using the availability of collateral for the credit to micro, small and medium enterprises (MSME). Using 384 sample size from MSME in West Sumatera, if a MSME have enough collateral, the probability of their credit application to be rejected by banks will fall from 59.9% to 11.7% comparing to they don't have enough collateral. This finding proved a credit guarantee scheme is needed, and for the further study it is recommended to conduct research on the characteristic of the potentials of MSME as a credit scoring model for banks.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises; Banking Credit; Logistic Model*

Abstrak

Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan di Sumatera Barat cenderung untuk menggunakan jaminan yang cukup sebagai dasar penolakan dan pemberian kredit yang diajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan data hasil survei dengan ukuran sampel sebanyak 384 UMKM di Sumatera Barat, penulis menemukan bahwa peluang sebuah aplikasi kredit yang diajukan UMKM ditolak akan berkurang dari 59,9% menjadi 11,7% jika UMKM tersebut memiliki jaminan yang cukup. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya sistem penjaminan kredit untuk UMKM dan sekaligus merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi karakteristik UMKM yang memiliki potensi yang baik dan pembuatan model kredit *scoring*.

Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Kredit Perbankan; Model Regresi Logistik

Kode Klasifikasi JEL: K00; O18; R12

Pendahuluan

Peranan sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi masih menjadi perdebatan teoritis dan empiris sampai saat ini. Pada satu sisi, para ahli menganggap bahwa sektor finansial tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi namun merespons pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain menyatakan bahwa, sektor finansial akan sangat memengaruhi keputusan pelaku ekonomi dalam alokasi tabungan dan investasi yang merupakan hal yang penting dalam teori pertumbuhan ekonomi modern,

sehingga mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor finansial (Levine, 2004).

Bank Indonesia (2011) mengemukakan bahwa harus ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sektor keuangan dalam perekonomian masyarakat yang merupakan esensi utama dari pemahaman terkait dengan inklusi keuangan. Selanjutnya, potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sudah dipahami oleh ahli ekonomi dan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Keterbatasan akses UMKM terhadap kredit, khususnya kredit perbankan, juga sudah teridentifikasi seba-

* Alamat Korespondensi: Fakultas Ekonomi UNP Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. (0751) 445089. E-mail: jomarta01@yahoo.com.

** E-mail: dosat.2002@gmail.com.

gai salah satu sumber belum optimalnya potensi UMKM tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Hasil penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki akses yang terbatas terhadap kredit perbankan (de Aghion dan Morduch, 2005).

Kebijakan pro UMKM bagi pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tiga argumen utama (Beck *et al.*, 2003). *Pertama*, UMKM meningkatkan kompetisi dan kewirausahaan yang dapat mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas perekonomian. *Kedua*, UMKM diyakini memiliki produktivitas yang lebih baik, tetapi tidak mendapatkan dukungan yang cukup baik dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan besar. Dan *ketiga*, UMKM memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan besar. Kondisi ini mendorong rekomendasi kebijakan untuk memprioritaskan pembiayaan UMKM dalam perekonomian, khususnya negara berkembang (World Bank, 1994, 2001).

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan usaha kecil perlu terus ditingkatkan, terutama dalam membantu pelaku usaha tersebut mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahanya. Upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), perbaikan teknologi, pelayanan informasi dalam pengembangan pemasaran, peningkatan kelembagaan usaha, serta akses ke sumber modal dan pusat pemasaran akan menjadi bagian penting peran pemerintah dalam pembinaan pengembangan usaha kecil dan menengah pada masa ke depan.

Secara operasional, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, karena pada umumnya lapangan usaha yang menjadi basis ekonomi kerakyatan di daerah ini terkait dengan lapangan usaha pertanian, industri dan kerajinan, perdagangan dan jasa, serta lapangan usaha lainnya yang merupakan kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan program di provinsi bersifat memberikan dukungan bagi kelangsungan pelaksanaan program di kabupaten/kota, antara lain dalam bentuk fasilitasi promosi dan pemasaran, penyusunan pedoman pembinaan, penyusunan standar pelayanan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan provinsi.

Salah satu potensi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, untuk melakukan intervensi adalah melalui akses modal UMKM ke dana perbankan. Sistem perbankan yang memiliki

aturan yang jelas dan menganut prinsip kehati-hatian bank, tentunya dapat menyulitkan kelompok UMKM untuk mengakses permodalan dari perbankan. Sehingga yang berlaku saat ini adalah akses kredit ataupun permodalan kelompok usaha mikro kecil ke lembaga keuangan cenderung menggunakan fasilitas permodalan yang memiliki bunga tinggi. Celah bagi intervensi pemerintah daerah di sini adalah untuk memfasilitasi kemudahan dan kemurahan biaya modal bagi UMKM di daerahnya.

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis empiris yang terkait dengan faktor penentu sebuah usaha UMKM mengalami penolakan terhadap kredit yang diajukan. Secara lebih khusus, penelitian ini berusaha mengungkapkan seberapa besar peran jaminan kredit yang cukup untuk meningkatkan peluang bagi sebuah UMKM agar dapat disetujui pengajuan kreditnya oleh sebuah bank. Dari hasil temuan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan otoritas pengambil kebijakan keuangan dalam upaya untuk meningkatkan peranan sektor keuangan untuk pengembangan usaha UMKM.

Tinjauan Literatur

Mahjabeen (2010) memodelkan alokasi portofolio yang optimal bagi lembaga kredit mikro dan bank umum. Modelnya menggunakan asumsi bahwa bank ataupun lembaga kredit mikro memiliki tujuan untuk mengoptimalkan alokasi portofolio yang dikelola, dan menggunakan *constant elasticity of substitution* (CES) *Utility Function* untuk memahami perilaku lembaga keuangan mikro dan bank dalam mengalokasikan portofolio yang dikelola. Hasil analisis teoritis dalam model tersebut menunjukkan bahwa bank yang memaksimalkan keuntungan tidak akan menawarkan kredit UMKM ke pasar kredit karena tingginya biaya kredit mikro dan risiko nasabah mikro. Ketika bank menyalurkan kredit mikro, maka akan mengorganisasikan secara khusus penyaluran kredit ke kelompok UMKM tersebut, sehingga bank sudah melakukan rasionalisasi kredit khusus untuk kelompok UMKM.

Dalam literatur ekonomi, analisis *credit rationing* dipelopori oleh model teoritis yang dikembangkan oleh Stiglitz dan Weiss (1981). Ketidaktepatan informasi dalam pasar kredit menyebabkan bank menghadapi kondisi biaya *monitoring* terha-

dap perilaku debiturnya yang terlalu tinggi. Bank menggunakan instrumen tingkat bunga dan jaminan kredit untuk melakukan seleksi terhadap calon debitur yang mengajukan pinjaman. Calon debitur yang lebih berisiko akan dikenakan tingkat bunga yang lebih tinggi dan bersedia memberikan jaminan aset yang lebih besar nilainya, dan sebaliknya yang kurang berisiko akan menerima tingkat bunga yang lebih rendah. Namun, bank tidak memiliki informasi yang cukup untuk memilah calon debitur, sehingga hanya menetapkan tingkat jaminan kredit dan bunga yang sama terhadap semua calon debitur yang tentunya sudah memasukkan komponen risiko dalam tingkat bunganya. Dengan asumsi informasi yang tidak sempurna di pasar kredit, tingkat bunga gagal berperan sebagai penyeimbang permintaan dan penawaran, dan bank memaksimalkan keuntungan dengan melakukan *credit rationing* terhadap nasabahnya.

Ketersediaan informasi tentang nasabah memiliki peranan penting bagi bank untuk menentukan persetujuan aplikasi kredit dari debiturnya sehingga dapat memahami profil risiko dari usaha yang akan dibiayai. Menurut Gorman *et al.* (2005), informasi yang lengkap bagi bank tidak selalu tersedia, artinya ada situasi informasi yang asimetris, yang terjadi akibat salah satu pihak dalam kontrak perjanjian kredit memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lain. Bagi perbankan, untuk memperoleh informasi yang baik terkait dengan calon debiturnya tentunya memiliki konsekuensi biaya, dan akibatnya UMKM akan dikenakan biaya modal yang lebih besar untuk memperoleh kredit yang diajukan. Jika terdapat informasi yang asimetris di pasar kredit, maka akan terjadi eksese *demand* di pasar kredit tersebut (Jaffee dan Russell, 1976; Stiglitz dan Weiss, 1981).

Mekanisme seleksi oleh perbankan terhadap UMKM yang akan diberi kredit adalah dengan menggunakan instrumen tingkat bunga. Namun, tingkat bunga yang terlalu tinggi akan menyebabkan masalah *adverse selection* bagi bank dalam alokasi kreditnya (Akerlof, 1970). Pada saat tingkat bunga tidak memungkinkan lagi menjadi instrumen mekanisme seleksi, maka sejauh ini karakteristik demografi memiliki korelasi yang tinggi dengan kapasitas kreditnya, sehingga bank sebagai kreditur dapat menggunakan karakteristik debitur sebagai proksi untuk indikator kelayakan kreditnya (Arrow (1973) dan Phelps (1972) dalam Muravyev *et al.*, 2008). Implikasi untuk kelayakan kredit UMKM adalah pada saat informasi tidak cukup,

perbankan dapat menggunakan informasi demografi dari calon debitur selain informasi bisnis dari calon debitur. Sehingga terlepas dari ketersediaan informasi bisnis yang baik, maka peranan karakteristik individu, pendidikannya, reputasi debitur, dan *skill* debitur menjadi determinan penting untuk alokasi kredit perbankan.

Dalam satu dasawarsa terakhir, publikasi literatur empiris yang terkait dengan analisis determinan kredit UMKM sangat banyak (de Aghion dan Morduch, 2005)¹. Merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis determinan kredit (Bebczuk, 2004; Nuryartono *et al.*, 2005; Argentiero, 2009; Wesaratchakit *et al.*, 2010; Le, 2012; Wanjaw *et al.*, 2014), berbagai model (*binary dependent variable* dan panel data) digunakan untuk menganalisis determinan terhadap akses kredit UMKM. Dengan menggunakan model analisis tersebut, maka penulis akan bisa mengidentifikasi perilaku bank dalam menentukan alokasi kredit perbankan ke kelompok UMKM.

Nuryartono *et al.* (2005) menemukan bahwa tidak cukupnya jaminan kredit menjadi kendala utama terhadap penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan hasil survei terhadap kelompok rumah tangga petani di perdesaan Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 18,1% dari responden tidak mengalami *credit constraint* dan sebagian besar yang mengalami *credit constrain* disebabkan oleh kurangnya ketersediaan jaminan. Menggunakan model estimasi *probit* dalam penelitian ini, selain jaminan, variabel karakteristik rumah tangga, indikator modal manusia, dan status *welfare* berperan dalam menentukan peluang rumah tangga petani di Sulawesi Tengah mengalami kendala dalam memperoleh kredit.

Bebczuk (2004) meneliti determinan akses kredit UMKM di Argentina. Hasil utama temuan empirisnya adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap peluang untuk memperoleh kredit perbankan. Terdapat hubungan yang positif antara profitabilitas perusahaan dengan peluang untuk memperoleh kredit bank serta kinerja masa lampau utang perusahaan di bank memiliki dampak yang signifikan. Sedangkan jaminan nampaknya tidak memengaruhi

¹Dalam bagian pengantar bukunya, de Aghion dan Morduch (2005) melakukan *review* terhadap berbagai literatur yang terkait dengan determinan kredit dan pengembangan jangkauan kredit UMKM.

i probabilitas akses UMKM terhadap kredit perbankan. Pebelitian ini menggunakan indikator aset tetap UMKM sebagai proksi ketersediaan jaminan kredit yang diajukan.

Argentiero (2009) menguji hipotesis terkait dengan perilaku bank untuk mensubstitusi proses seleksi kredit dengan ketersediaan jaminan (*Lazy Bank versus Diligent Bank Hypothesis*). Hasil temuannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan negatif dan signifikan antara kenaikan jumlah jaminan dengan turunnya usaha bank dalam melakukan seleksi kredit. Hasil temuan ini menggunakan data kredit perbankan secara umum di Italia. Namun, pada saat menguji hubungan antara risiko (*ex-post default risk*) dengan ketersediaan jaminan, penelitian ini menemukan hubungan yang negatif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa jaminan digunakan bank untuk melakukan mitigasi terhadap risiko kredit yang akan muncul dengan cara meningkatkan komitmen dari perusahaan yang mengajukan kredit terhadap kontrak kredit yang disetujuinya, bukan sebagai substitusi proses seleksi dalam persetujuan kredit.

Wesaratchakit *et al.* (2010) menggunakan data dari Kementerian Perdagangan Thailand yang mengonfirmasi temuan bahwa perusahaan kecil dan relatif baru cenderung mengalami kesulitan memperoleh kredit. Hasil temuan menggunakan regresi data panel dengan menggunakan *industrial fixed effect* yang menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah mapan dengan laporan keuangan yang baik, *leverage ratio* yang rendah, dan jaminan kredit yang cukup, dapat meningkatkan jumlah kredit yang diajukannya.

Penelitian Le (2012) di Vietnam dan Wanjau *et al.* (2014) di Kenya merupakan dua riset terbaru yang menganalisis determinan kredit UMKM. Kedua penelitian ini menggunakan model *binary dependent variable* dan menggunakan karakteristik UMKM sebagai determinan kredit. Hasil temuan keduanya menunjukkan bahwa peranan karakteristik UMKM penting untuk menjelaskan determinan kredit ke UMKM pada kedua negara. Dari kedua hasil penelitian, merekomendasikan bahwa keterbatasan jaminan menjadi salah satu faktor penghambat akses UMKM terhadap kredit.

Secara garis besar, berdasarkan literatur empiris determinan, kelayakan kredit adalah (1) vektor dari karakteristik pengusaha (*entrepreneur*); (2) vektor dari karakteristik UMKM; dan (3) vektor dari kondisi pinjaman/kredit yang diajukan.

Metode

Hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya (Nuryartono *et al.*, 2005; Bebczuk, 2004; Wanjau *et al.*, 2014; Le, 2012) pada beberapa negara berkembang, sebagaimana dikemukakan pada bagian tinjauan referensi, menunjukkan bahwa karakteristik usaha UMKM, karakteristik pengusaha/pemilik UMKM, dan karakteristik pinjaman memiliki peranan terhadap akses persetujuan kredit ke perbankan. Karakteristik UMKM antara lain terdiri dari: usia perusahaan, aset, pengalaman perusahaan, jenis/sektor usaha, profil risiko, aliran dana, target pasar, dan informasi ketersediaan *input*. Karakteristik pengusaha pemilik antara lain: usia pengusaha/pemilik, gender, pengalaman, dan pengeluaran rumah tangga. Karakteristik pinjaman meliputi jumlah kredit, jangka waktu, tujuan penggunaan dana, jaminan (*collateral*), tingkat bunga, dan hambatan administrasi.

Selanjutnya, berdasar pada penelitian teoritis (Stiglitz dan Weiss, 1981), ketidaksempurnaan informasi yang terjadi dalam pasar kredit perbankan menyebabkan terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard*. Sehingga terjadi kondisi keseimbangan dengan *credit rationing* dalam pasar kredit perbankan. Menghadapi kendala tersebut, perbankan menggunakan ketersediaan jaminan sebagai upaya untuk mengurangi permasalahan tidak sempurnanya informasi dalam pasar kredit (Argentiero, 2009). Berdasarkan pandangan ini, ketersediaan jaminan merupakan substitusi dari proses seleksi yang dilakukan oleh bank terhadap pengajuan kredit sebagai konsekuensi tingginya biaya proses seleksi terhadap kredit dengan cara memperkecil ketidaksempurnaan informasi tentang calon debitur.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan literatur empiris yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa variabel yang memengaruhi ditolaknya kredit yang diajukan oleh sebuah UMKM adalah karakteristik pengusaha, karakteristik usaha UMKM, dan karakteristik kredit yang diajukan. Menggunakan model regresi *binary dependent variable*, penulis dapat menghitung perubahan peluang sebuah kredit yang diajukan UMKM ditolak bank akibat perubahan pada variabel bebasnya.

$$\text{Credit} = f(E, B, L) \quad (1)$$

dengan:

Credit : Peluang kredit yang diajukan oleh UMKM ditolak bank. Merupakan *binary dependent va-*

- riable* (nilai 1 jika UMKM ditolak aplikasi kreditnya dan bernilai 0 jika memperoleh kredit);
- E* : Vektor karakteristik pengusaha; antara lain usia, gender, pengalaman, dan pengeluaran rumah tangga;
- B* : Vektor karakteristik UMKM; antara lain usia perusahaan, pengalaman perusahaan, aset, jenis/sektor usaha, profil risiko, aliran dana, target pasar, dan informasi ketersediaan *input*;
- L* : Vektor karakteristik pinjaman yang diajukan; antara lain jumlah kredit, jangka waktu, tujuan penggunaan dana, *collateral*, dan tingkat bunga.

Karakteristik pengusaha merupakan informasi penting bagi bank untuk melakukan proses seleksi dalam persetujuan kredit. Hal ini karena UMKM cenderung tidak memiliki informasi keuangan yang lengkap (Nuryartono *et al.*, 2005). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel pendidikan pengusaha dan dependensi rasio pada rumah tangga pemilik UMKM sebagai proksi dari vektor karakteristik pengusaha. Semakin tinggi pendidikan pengusaha, maka peluang kredit ditolak oleh bank semakin rendah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *dummy* variabel bernilai 1 jika pengusaha berpendidikan tamat SMA ke atas dan 0 jika lainnya. Semakin banyak tanggungan dalam rumah tangga pengusaha, maka peluang kredit ditolak oleh bank semakin besar. Dalam penelitian ini, sebagai indikator dependensi rasio, penulis menggunakan rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja terhadap total jumlah anggota rumah tangga.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel besar total aset yang dimiliki, usia usaha, dan sektor usaha UMKM tersebut sebagai proksi dari vektor karakteristik UMKM. Bank menggunakan informasi besarnya nilai total aset yang dimiliki, pengalaman UMKM dalam menjalankan bisnis serta kondisi, dan prospek usaha UMKM sebagai indikator kemampuan UMKM dalam mengembalikan pinjaman (Le, 2012; Wanjau *et al.*, 2014). Semakin besar nilai total aset yang dimiliki, maka peluang kredit ditolak oleh bank semakin rendah. Total aset adalah jumlah aset perusahaan dan aset rumah tangga yang dimiliki UMKM. Semakin berpengalaman UMKM tersebut, maka peluang kredit ditolak oleh bank semakin rendah. Sektor industri kecil merupakan sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan prospek pengembangan usaha yang baik dibandingkan dengan sek-

tor lainnya (Wesaratchakit *et al.*, 2010). Jika sebuah UMKM bergerak di sektor industri, maka peluang kredit ditolak oleh bank semakin rendah.

Selain karakteristik pengusaha dan perusahaan, karakteristik pinjaman merupakan faktor penentu penolakan kredit yang diajukan oleh UMKM. Ketersediaan dan besarnya jaminan sebagai proksi terhadap kualitas jaminan masih merupakan persyaratan bagi bank untuk menyetujui pemberian kredit (Argentiero, 2009). Jika perusahaan tidak memiliki jaminan atau nilai jaminan lebih rendah dari nilai kredit yang diajukan, maka peluang kredit ditolak oleh bank lebih besar dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan *dummy* variabel bernilai 1 jika perusahaan tidak memiliki jaminan atau nilai jaminan lebih rendah dari nilai kredit yang diajukan dan 0 jika lainnya. Jangka waktu kredit merupakan proksi dari risiko, semakin lama jangka waktu kredit semakin besar peluang gagal bayar (*default risk*) sehingga semakin besar peluang kredit ditolak (Argentiero, 2009). Jika semakin luas jangkauan pelayanan bank, maka semakin mudah UMKM untuk mengakses kredit ke bank tersebut.

Sebagian besar kredit yang disalurkan ke UMKM dilakukan oleh bank pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada tahun 2012, sebesar 79,04% dari *outstanding* kredit UMKM di Sumatera Barat disalurkan oleh kelompok bank tersebut (Bank Indonesia, 2012). Penelitian ini menggunakan *dummy* variabel bernilai 1 jika perusahaan mengajukan kredit ke bank pemerintah dan 0 jika lainnya. Sehingga, UMKM yang mengajukan kredit ke bank pemerintah memiliki peluang kredit ditolak lebih rendah dibandingkan jika mengajukan kreditnya ke bank lainnya.

Berdasarkan pembahasan terhadap proksi dari vektor variabel karakteristik pengusaha, perusahaan, dan pinjaman model empiris, maka Persamaan (1) dapat diestimasi dengan menggunakan model regresi logistik (model *logit*). Penggunaan model *logit* dalam penelitian ini karena dapat langsung menghasilkan nilai probabilitas atau peluang dari variabel terikat tanpa harus mengintegrasikan hasil estimasi yang diperoleh dibandingkan jika menggunakan model *probit* (Winkelmann dan Boes, 2006: 102). Selanjutnya secara teori ekonometrika, hasil estimasi dengan menggunakan model ini relatif sama sehingga pemilihan model antara *logit* dan *probit* tidak memberikan perbedaan yang besar. Hasil analisis menggunakan metode regresi logistik tersebut memberikan evaluasi terhadap faktor penentu atau determinan ditolaknya kredit

yang diajukan UMKM di Sumatera Barat. Berdasarkan persamaan tersebut, maka spesifikasi model dasar dalam penelitian ini adalah:

Model 1

$$L_n \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 \text{edu} + \beta_2 \text{dep_ratio} + \beta_3 \text{aset} \\ + \beta_4 \text{age} + \beta_5 \text{sector} + \beta_6 \text{coll} \\ + \beta_7 \text{tenor} + \beta_8 \text{bank} + \varepsilon \quad (2)$$

Selanjutnya, untuk menganalisis lebih mendalam mengenai peranan jaminan terhadap peluang penolakan kredit UMKM oleh bank, penulis menginteraksikan *dummy* nilai jaminan dengan nilai total aset. Hal ini untuk mengontrol peranan aset yang cenderung juga mampu berperan sebagai jaminan walaupun tidak dimasukkan dalam kontrak kredit sebagai jaminan. Spesifikasi model empiris dengan menggunakan variabel interaksi ini adalah sebagai berikut:

Model 2

$$L_n \left[\frac{P_i}{1 - P_i} \right] = \beta_0 + \beta_1 \text{edu} + \beta_2 \text{dep_ratio} + \beta_3 \text{aset} \\ + \beta_4 \text{age} + \beta_5 \text{sector} + \beta_6 \text{coll} * \text{aset} \\ + \beta_7 \text{tenor} + \beta_8 \text{bank} + \varepsilon \quad (3)$$

Setelah melakukan estimasi terhadap Persamaan (2) dan (3), penulis melakukan pengujian statistik dan hipotesis, sehingga model hasil estimasi layak dijadikan sebagai alat analisis dampak jaminan terhadap peluang penolakan kredit UMKM. Dalam penelitian ini, penulis melaporkan hasil estimasi koefisien dan efek marginal dari kedua model tersebut. Efek marginal (*average partial effect*) dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Wooldridge, 2005):

$$ME = n^{-1} \sum_{i=1}^n [g(\hat{\beta}_0 + x_i \hat{\beta}) \hat{\beta}_j] \quad (4)$$

dengan ME adalah efek marginal dan $g(\hat{\beta}_0 + x_i \hat{\beta}) = \exp(\hat{\beta}_0 + x_i \hat{\beta}) / [1 + \exp(\hat{\beta}_0 + x_i \hat{\beta})]^2$

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan survei ke lapangan. Untuk

memperoleh data yang digunakan sebagai indikator variabel bebas dalam model yang penulis spesifikasi, maka digunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Populasi penelitian adalah UMKM di Sumatera Barat. Selanjutnya, untuk proses pengumpulan data dan pemilihan sampel, penulis melandaskan pada teknik *stratified random sampling*. Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis lakukan, diperoleh total 401 UMKM yang harus penulis survei, dengan distribusi sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: (a) wilayah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kota Payakumbuh diperoleh sampel sebanyak 177 UMKM; (b) wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman diperoleh sampel sebanyak 102 UMKM; dan (c) Wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok diperoleh sampel sebanyak 122 UMKM.

Selanjutnya, selain menggunakan data survei, penelitian ini juga menggunakan data-data hasil publikasi resmi pemerintah antara lain dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil dan Analisis

Dampak Jaminan terhadap Peluang Penolakan Aplikasi Kredit UMKM oleh Bank di Sumatera Barat

Status Pengajuan Kredit UMKM di Sumatera Barat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tinjauan literatur dan kajian teori, perseptuan kredit yang diajukan oleh UMKM ke pihak perbankan memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik dari UMKM, karakteristik pengelola, dan karakteristik kredit yang diajukan. Berikut ini disampaikan secara deskriptif temuan data hasil survei sesuai sampel yang diperoleh. *Pertama*, secara garis besarnya, untuk karakteristik UMKM, penulis menggunakan indikator nilai aset dan usia UMKM. Nilai aset dan usia dapat mencerminkan kapasitas UMKM dalam membayar kredit, mengingat semakin lama usia usaha tersebut akan semakin berpengalaman dan juga menunjukkan daya tahan UMKM dalam menghadapi persaingan bisnisnya. Selanjutnya, semakin besar asetnya menunjukkan bahwa UMKM tersebut memiliki kapa-

Tabel 1: Penjelasan Operasional Variabel

Variabel Terikat		
<i>Pi</i> (Status pengajuan kredit)	1	Jika kredit yang diajukan ditolak
merupakan variabel <i>Dummy</i> yang memiliki nilai 1 dan 0	0	Lainnya
Variabel Bebas		
<i>Edu</i>	1	Tamat SMA
merupakan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pemilik/pengelola UMKM	0	Lainnya
<i>dep_ratio</i>		Dalam %
merupakan rasio antara jumlah anggota keluarga yang bekerja dengan total anggota keluarga		
<i>Aset</i>		Dalam Rupiah
Merupakan total aset yang dimiliki oleh UMKM		
<i>Age</i>		Dalam Tahun
Merupakan jangka waktu UMKM beroperasi mulai dari waktu pendirian sampai pada waktu pengajuan kredit		
<i>Sector</i>	1	Sektor Industri
merupakan sektor usaha UMKM	0	Lainnya
<i>Coll</i>	1	Nilai Jaminan < dari nilai pengajuan kredit
merupakan nilai yang dijadikan jaminan dalam proses pengajuan kredit	0	Lainnya
<i>Tenor</i>		Dalam Bulan
merupakan jangka waktu kredit yang diajukan		
<i>Bank</i>	1	Bank Pemerintah
jenis bank/tempat UMKM mengajukan kredit	0	Lainnya

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

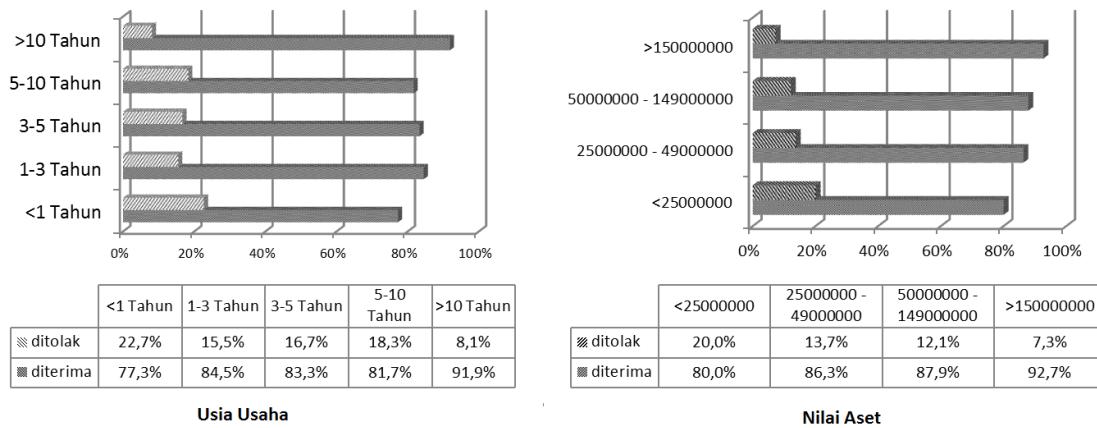
sitas membayar yang juga besar.

Kedua, karakteristik pengelola UMKM menggunakan indikator tingkat pendidikan pengelola UMKM dan kondisi rumah tangga UMKM. Tingkat pendidikan pengelola yang tinggi mengindikasikan semakin besar kapasitas kemampuan pengelola untuk mengendalikan usahanya dan mencerminkan kapasitas membayar kreditnya. Selanjutnya, kondisi rumah tangga pengelola UMKM diwakili oleh rasio jumlah anggota rumah tangga yang berpenghasilan terhadap total jumlah anggota rumah tangga. Pada bagian analisis deskriptif ini, kondisi rasio jumlah anggota rumah tangga yang berpenghasilan tidak dianalisis, mengingat keterbatasan ruang dan peranannya yang tidak signifikan dalam hasil analisis empiris.

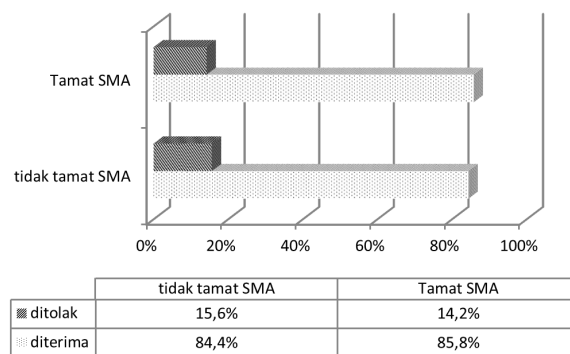
Ketiga adalah karakteristik pinjaman yang diajukan oleh UMKM. Proksi untuk karakteristik pinjaman ini adalah kelompok bank tempat mengajukan kredit (bank pemerintah dan non-bank pemerintah), jangka waktu kredit yang diajukan (tenor), dan nilai barang yang digunakan sebagai agunan kredit oleh UMKM. Keseluruhan karakteristik dari UMKM yang digunakan sebagai variabel penentu persetujuan kredit UMKM oleh perbankan diharapkan sudah mencerminkan kualitas jaminan dan tingkat risiko kredit ke UMKM tersebut dari perspektif perbankan.

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara karakteristik UMKM dengan status pengajuan kredit UMKM ke perbankan. Berdasarkan usia UMKM, menunjukkan bahwa kelompok UMKM yang terbesar mengalami penolakan adalah yang berusia di bawah 1 tahun, dan yang terendah mengalami penolakan untuk kredit yang diajukan adalah kelompok UMKM yang sudah berbisnis lebih dari 10 tahun. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kelompok usia usaha UMKM antara 3–10 tahun justru mengalami tingkat penolakan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia usaha UMKM antara 1–3 tahun. Temuan ini merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan kajian teoritis yang menyatakan semakin tinggi usia usaha maka biaya meminjam (*borrowing cost*) akan semakin rendah (Diamond, 1989). Dengan demikian, seharusnya UMKM pada kelompok usia 5–10 tahun mengalami penolakan lebih rendah dibandingkan kelompok usia 1–3 tahun.

Selanjutnya, dari sisi nilai aset yang dimiliki oleh UMKM menunjukkan bahwa semakin besar nilai aset maka akan semakin rendah tingkat penolakan oleh bank terhadap kredit yang diajukan UMKM. Terjadi penurunan tingkat penolakan dari kelompok UMKM yang memiliki aset lebih kecil dari 25 juta rupiah dibandingkan dengan kelompok UMKM yang memiliki aset yang lebih besar dari



Gambar 1: Usia Usaha dan Nilai Aset UMKM
 Sumber: Data Hasil Survei, 2012



Gambar 2: Pendidikan Pengelola UMKM
 Sumber: Data Hasil Survei, 2012

25 juta rupiah.

Berdasarkan Gambar 2, pendidikan pengelola UMKM cenderung tidak terlalu berperan penting. Terlihat bahwa pengelola UMKM dengan tingkat pendidikan SMA ke atas, walaupun tingkat penolakannya lebih rendah tetapi selisihnya hanya sebesar 1,4% dibandingkan dengan pendidikan pengelola UMKM tidak tamat SMA ke bawah.

Berdasarkan Gambar 3, bank pemerintah merupakan kelompok bank yang paling sedikit menolak UMKM, sedangkan kelompok bank swasta adalah kelompok yang paling tinggi tingkat penolakan kreditnya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, lebih dari 35% kredit yang diajukan UMKM ditolak oleh bank swasta. Implikasi dari kondisi ini adalah bank swasta sangat selektif dalam menyalurkan kreditnya ke kelompok UMKM dibandingkan dengan kelompok bank lain, khususnya kelompok bank pemerintah. Tingginya tingkat persetujuan kredit bank pemerintah tidak terlepas dari peranan bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nagari di Sumatera Barat yang memang memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas ke kelompok UMKM. Oleh karena itu, dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas, maka akses UMKM untuk memperoleh kredit dari kedua bank tersebut semakin mudah.

Berdasarkan jangka waktu pengajuan kredit, terlihat bahwa bank lebih memprioritaskan untuk menyalurkan kredit jangka pendek ke kelompok UMKM. Kondisi ini terlihat dengan tidak adanya penolakan terhadap kredit dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Hal ini tidak lepas dari risiko kredit sebagai pertimbangan bank untuk memberikan persetujuan pemberian kredit. Risiko kredit akan semakin besar jika semakin panjang waktu pembayaran kembali kredit tersebut dan biasanya, jika jangka waktu pembayaran kredit tersebut singkat, maka nilai kredit yang diajukan oleh UMKM juga relatif kecil.

Jaminan menunjukkan peranan yang penting dalam persetujuan kredit ke kelompok UMKM. Bank hanya menolak 5,2% pengajuan kredit yang memiliki kualitas jaminan baik, dengan kata lain memiliki nilai jaminan yang lebih besar dibandingkan jumlah kredit yang diajukan. Kondisi ini kemudian penulis konfirmasi ke beberapa narasumber di sektor perbankan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, menunjukkan bahwa jika jaminan UMKM lebih besar dari nilai kredit yang diajukan yang kemudian ditolak biasa-

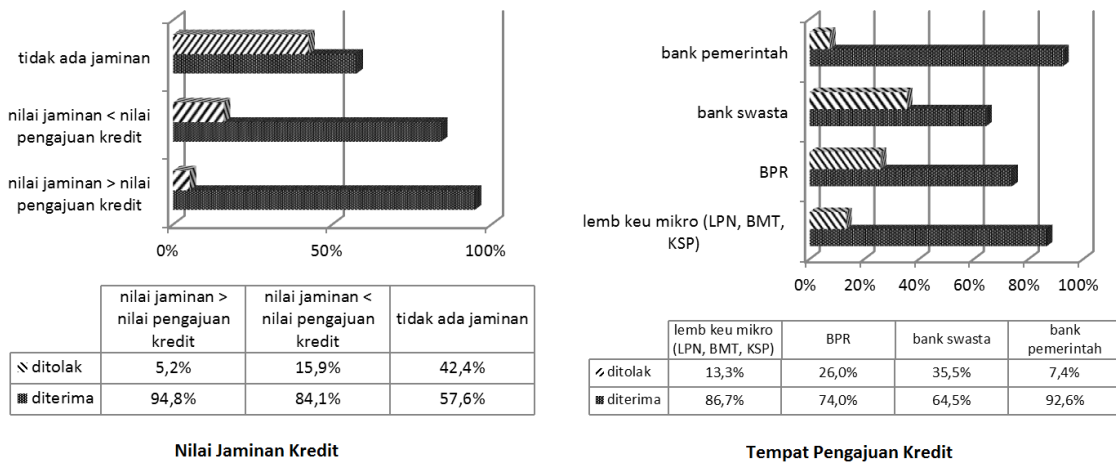
nya disebabkan adanya catatan negatif dari calon debitur yang ditolak tersebut.

Peluang Penolakan Pengajuan Kredit UMKM oleh Bank di Sumatera Barat

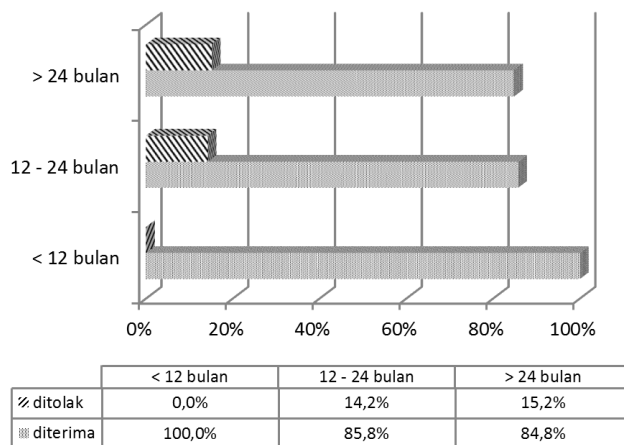
Menggunakan data hasil survei, dapat penulis laporkan hasil temuan empiris terkait dengan dampak jaminan/agunan terhadap perubahan peluang penolakan sebuah kredit yang diajukan oleh UMKM oleh bank di Sumatera Barat. Menggunakan variabel bebas yang mewakili karakteristik pemilik UMKM, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit yang diajukan untuk menganalisis dampak ketersediaan jaminan/agunan terhadap penolakan kredit yang diajukan UMKM. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, diperoleh total 384 sampel data yang valid untuk digunakan. Sehingga dalam melakukan estimasi menggunakan model empiris, penulis menggunakan jumlah observasi sebanyak 384 sample yang mewakili populasi UMKM di Sumatera Barat.

Menggunakan data yang secara operasionalnya penulis definisikan sebagaimana dalam Tabel 1, dapat penulis laporkan hasil estimasi model empiris sebagai temuan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel hasil estimasi (Tabel 2). Secara umum, hasil estimasi yang dilakukan menggunakan data hasil survei untuk mengetahui dampak perubahan peluang sebuah UMKM mengalami penolakan aplikasi kredit terkait dengan nilai jaminan yang digunakan dalam aplikasi kreditnya, memiliki properti yang cukup baik secara ekonometrik dan statistik. Seluruh variabel bebas yang digunakan dalam model pada kedua persamaan yang dilaporkan memiliki kemampuan menjelaskan variasi variabel terikat yang cukup baik. Hasil ini bisa dilihat dari nilai McFadden R^2 sebesar 0,267. Pengujian statistik menggunakan statistik *Likelihood Ratio* (LR) pada kedua model juga menunjukkan hasil yang secara statistik signifikan. Dengan demikian, kedua hasil estimasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil temuan empiris dari kedua model regresi logistik yang dispesifikasikan pada Persamaan (2) dan (3), menunjukkan bahwa koefisien McFadden R^2 sebesar 0,267 dan 0,268 untuk model 1 dan model 2. Berdasarkan hasil uji statistik LR, seluruh variabel bebas yang digunakan dalam kedua model memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama pada taraf signifikansi 1%.



Gambar 3: Nilai Jaminan dan Tempat Pengajuan Kredit
Sumber: Data Hasil Survei, 2012



Gambar 4: Jangka Waktu Pengajuan Kredit
Sumber: Data Hasil Survei, 2012

Tabel 2: Hasil Estimasi

Variabel Terikat: $\ln(P/1-P)$ $P(y=1 x)$ =peluang kredit yang diajukan UMKM ditolak bank						
Variabel	Model 1			Model 2		
	Koefisien	Statistika z	ME	Koefisien	Statistika z	ME
<i>Edu</i>	0,218075	0,585305	0,0202	0,212748	0,574104	0,0198
<i>Depratio</i>	-0,280329	-0,369034	-0,0260	-0,259952	-0,343732	-0,0242
<i>ln(aset)</i>	-0,283689	-1,906513*	-0,0263	-0,377951	-2,500557**	-0,0218
<i>Age</i>	-0,036893	-1,534635	-0,0034	-0,035851	-1,484452	-0,0033
<i>Sector</i>	0,702680	1,877433*	0,0653	0,695931	1,848187*	0,0648
<i>Coll</i>	2,419264	5,506783***	0,2250	-	-	-
<i>coll*ln(aset)</i>	-	-	-	0,143250	5,505453***	0,2320
<i>tenor</i>	0,014169	1,972989**	0,0013	0,014471	1,988640**	0,0013
<i>bank</i>	-1,991170	-5,239277***	-0,1851	-1,977241	-5,243141***	-0,1841
<i>C</i>	2,195476	0,838568		3,750552	1,461301	
<i>McFadden R-squared</i>	0,266719			0,268188		
<i>LR statistic</i>	85,093410			85,561780		

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Keterangan: * signifikan pada taraf 10%

** signifikan pada taraf 5%

*** signifikan pada taraf 1%

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap dampak parsial masing-masing variabel bebas yang digunakan pada kedua model, dapat disampaikan hasil sebagai berikut. *Pertama*, hasil uji Wald terhadap vektor variabel yang mewakili karakteristik pengusaha, yaitu tingkat pendidikan pengusaha (*edu*) dan jumlah tanggungan dalam rumah tangga (*depratio*), tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat yang digunakan. *Kedua*, hasil uji Wald terhadap vektor variabel yang mewakili karakteristik UMKM, yaitu total aset yang dimiliki oleh UMKM (*aset*), memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap peluang penolakan kredit yang diajukan oleh UMKM. Sedangkan sektor usaha UMKM (*sector*) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peluang penolakan kredit yang diajukan oleh UMKM. UMKM yang bergerak di sektor industri memiliki peluang lebih besar untuk ditolak kreditnya dibandingkan UMKM yang bergerak di sektor lainnya. Kemudian, untuk usia usaha UMKM (*age*) tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat yang digunakan.

Ketiga, hasil uji Wald terhadap vektor variabel yang mewakili karakteristik pinjaman, yaitu jaminan yang diajukan (*coll*) dan lama jangka waktu kredit (*tenor*), memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peluang penolakan kredit yang diajukan oleh UMKM. Nilai jaminan yang lebih kecil dari nilai pengajuan kredit dan semakin lamanya jangka waktu pinjaman memiliki peluang lebih besar untuk ditolak kreditnya, dibandingkan

jika nilai jaminan lebih besar dari nilai pengajuan kredit dan jangka waktu pinjaman yang lebih singkat. Sedangkan untuk bank tempat pengajuan kredit (*bank*), memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap peluang penolakan kredit yang diajukan UMKM. Pengajuan kredit UMKM ke bank pemerintah memiliki peluang yang lebih kecil untuk ditolak kreditnya dibandingkan jika diajukan ke bank lainnya.

Kepemilikan aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, cenderung memiliki peran yang mirip dengan ketersediaan jaminan, karena yang dijaminakan biasanya adalah aset dari debitur. Untuk mengontrol peranan aset yang cenderung juga mampu berperan sebagai jaminan walaupun tidak dimasukkan dalam kontrak kredit maka lebih lanjut, dilakukan pengujian terhadap dampak interaksi antara aset dengan nilai jaminan. Model kedua menunjukkan dampak variabel interaksi adalah positif dan signifikan. Sedangkan dampak negatif dari aset secara parsial pada model pertama berkurang saat berinteraksi dengan tingkat jaminan yang tidak cukup.

Pada model 1 (Tabel 2) terdapat lima variabel yang memiliki dampak signifikan (*lnaset*, *sector*, *coll*, *tenor*, dan *bank*) terhadap variabel terikat. Untuk setiap kenaikan 1%, nilai aset yang dimiliki UMKM akan memperkecil peluang penolakan kredit yang diajukan sebesar 2,63%. UMKM yang bergerak di sektor industri memiliki peluang lebih besar untuk ditolak kreditnya sebesar 6,53% dibandingkan UMKM yang bergerak di sektor lainnya.

Nilai jaminan yang lebih kecil dari nilai pengajuan kredit memiliki peluang lebih besar untuk ditolak kreditnya sebesar 22,5% dibandingkan jika nilai jaminan lebih besar dari nilai pengajuan kredit. Setiap kenaikan 1 bulan jangka waktu kredit akan memperbesar peluang penolakan kredit yang diajukan sebesar 0,13%. Pengajuan kredit UMKM ke bank pemerintah memiliki peluang yang lebih kecil untuk ditolak kreditnya sebesar 18,51% dibandingkan jika diajukan ke bank lainnya.

Selanjutnya pada model 2, berdasarkan hasil interaksi nilai aset dengan jaminan, menunjukkan bahwa dampak parsial aset terhadap perubahan peluang penolakan kredit yang diajukan UMKM oleh bank adalah sebesar -0,0219, artinya setiap kenaikan 1% nilai aset yang dimiliki UMKM akan memperkecil peluang penolakan kredit yang diajukan sebesar 2,19%. Hasil ini menunjukkan terjadinya penurunan dampak negatif aset terhadap peluang penolakan kredit, jika dibandingkan model 1 sebesar 0,44%. Di samping itu, dampak parsial jaminan dalam model 2 terhadap peluang penolakan kredit adalah sebesar 0,0133**aset*. Menggunakan nilai rata-rata aset dalam sampel hasilnya adalah sebesar 0,2320. Artinya, jika nilai jaminan yang diajukan oleh UMKM lebih kecil dari nilai pengajuan kredit, akan memiliki peluang lebih besar untuk ditolak kreditnya sebesar 23,2%, dibandingkan jika nilai jaminan lebih besar dari nilai pengajuan kredit.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tentang dampak jaminan terhadap peluang penolakan kredit yang diajukan oleh UMKM ke perbankan di Sumatera Barat, maka berikut ini dapat disampaikan simulasi hasil estimasi yang dilakukan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: (a) simulasi dilakukan dengan menggunakan hasil estimasi model 1; (b) UMKM mengajukan kredit ke selain bank pemerintah (bank swasta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM)); (c) aset yang dimiliki adalah sebesar rata-rata nilai aset dalam sampel yang diperoleh berdasarkan hasil survei; (d) menggunakan jaminan/agunan yang nilainya lebih kecil dibandingkan kebutuhan kreditnya; (e) pendidikan pemilik tamat SMA atau lebih tinggi; (f) usia usaha menggunakan informasi yaitu telah melakukan usaha/kegiatan selama rata-rata usia usaha sampel; (g) jangka waktu kredit yang diajukan adalah rata-rata jangka waktu kredit yang diajukan dalam sampel yang diperoleh (bulan); (h) UMKM tersebut bergerak di sektor industri; dan (g) tanggung-

an rumah tangga pemilik UMKM sebesar rata-rata sampel (rasio).

Hasil perhitungan peluang ditolak kredit yang diajukan oleh kelompok UMKM yang memiliki karakteristik sebagaimana skenario tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil simulasi pertama (Tabel 3), menunjukkan bahwa peluang sebuah UMKM yang memiliki karakteristik sesuai asumsi memiliki potensi penolakan kredit yang tinggi oleh bank yaitu sebesar 59,9%. Ketika menggunakan jaminan yang relatif cukup, maka hasil perhitungan peluang penolakan oleh bank adalah sebesar 11,7% (Tabel 4). Terjadi penurunan peluang penolakan yang sangat signifikan oleh bank terhadap pengajuan kredit UMKM.

Berdasarkan hasil simulasi (Tabel 4) menunjukkan walaupun memiliki karakteristik yang baik dengan prospek usaha yang sangat baik sekalipun, tetapi jika jaminan yang digunakan sebuah UMKM kurang atau tidak ada, akan sulit untuk memperoleh persetujuan kredit perbankan, khususnya saat kredit tersebut diajukan ke selain bank pemerintah.

Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi kedua model tersebut, dapat penulis sampaikan temuan penting utama yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. *Pertama*, implikasi dari temuan ini adalah pentingnya kecukupan nilai jaminan bagi UMKM dalam mengajukan kredit. Lembaga penjamin kredit merupakan solusi bagi permasalahan yang dihadapi UMKM jika mengalami masalah tidak tersedianya jaminan namun sudah memiliki kelayakan untuk menerima kredit (Cowling, 2007; Holton *et al.*, 2013). *Kedua*, berdasarkan hasil temuan penelitian ini, lembaga keuangan selain bank pemerintah, yaitu bank umum swasta nasional, BPR, dan LPM, masih memiliki kecenderungan untuk menolak kredit UMKM. Di sisi lain, keterlibatan semua lembaga pembiayaan non-bank pemerintah sangat penting untuk meningkatkan penyaluran kredit ke kelompok UMKM. Selanjutnya, dikaitkan dengan model teoritis yang dikemukakan oleh Mahjabeen (2010), sebuah bank yang memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan perlu mengelola fasilitas kredit melalui lembaga khusus penyaluran kredit mikro perbankan.

Kesimpulan

Simpulan utama yang dapat penulis sampaikan dalam hasil penelitian ini adalah peranan jaminan

Tabel 3: Simulasi Pertama

<i>Ln Odd Ratio</i>	<i>Odd Ratio</i>	Peluang Ditolak
0,400151	1,49205	0,59872

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 4: Simulasi Kedua

<i>Ln Odd Ratio</i>	<i>Odd Ratio</i>	Peluang Ditolak
-2,01915	0,13277	0,11721

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

yang penting dalam peluang sebuah kredit yang diajukan oleh UMKM ditolak bank. Selanjutnya, karakteristik pengelola atau pemilik UMKM (usia, tingkat pendidikan, dan dependensi rasio) tidak memiliki dampak signifikan terhadap penentu penolakan kredit yang diajukan UMKM oleh bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Variabel lain yang signifikan menentukan penolakan bank adalah karakteristik usaha (yaitu aset dan jenis usaha UMKM) dan karakteristik pinjaman (yaitu jangka waktu kredit yang diajukan dan tempat pengajuan kredit). Berdasarkan hasil simulasi yang penulis lakukan, perubahan peluang penolakan kredit yang paling besar terjadi disebabkan oleh kecukupan nilai jaminan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, untuk peningkatan jangkauan pelayanan perbankan, khususnya peningkatan penyaluran kredit ke sektor UMKM, penting bagi pemerintah untuk menjamin kredit bagi UMKM yang memiliki potensi usaha yang baik untuk berkembang namun tidak memiliki jaminan yang cukup. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya lembaga penjamin kredit untuk UMKM yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan jaminan untuk memperoleh kredit perbankan.

Daftar Pustaka

- [1] Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
- [2] Argentiero, A. (2009). Some New Evidence on the Role of Collateral: Lazy Banks or Diligent Banks? *Working Paper n. 113*. Roma, Italy: Institute for Studies and Economic Analyses (Istituto Di Studi E Analisi Economica/ISAE). Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Amedeo_Argentiero/publication/46469796_Some_New_Evidence_on_the_Role_of_Collateral_Lazy_Banks_or_Diligent_Banks/links/00b4951b3569e7416d000000.pdf. Tanggal akses 23 November 2012.
- [3] Bank Indonesia. (2011). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Diakses dari http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/lpi_2010.aspx. Tanggal akses 7 Desember 2012.
- [4] Bank Indonesia. (2012). *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA)*. Diakses dari www.bi.go.id/id/statistik/sekda/statistikregional.aspx. Tanggal akses 7 Desember 2012.
- [5] Bebczuk, R. N. (2004). What Determines the Access to Credit by SMEs in Argentina? *Documentos de Trabajo*, 48. Diakses dari http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/3532/Documento_completo_...pdf?sequence=1. Tanggal akses 23 November 2012.
- [6] Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). Small and Medium Enterprises, Growth, and Poverty: Cross-Country Evidence. *World Bank Policy Research Working Paper* 3178. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/558581468779354920/pdf/WPS3178.pdf>. Tanggal akses 7 Desember 2012.
- [7] Cowling, M. (2007). The Role of Loan Guarantee Schemes in Alleviating Credit Rationing in the UK. *IES Working Paper: WP7*. United Kingdom: Institute for Employment Studies (IES) University of Sussex. Diakses dari <http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/wp7.pdf>. Tanggal akses 23 November 2012.
- [8] de Aghion, B. A., & Morduch, J. (2005). *The Economics of Microfinance*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [9] Diamond, D. W. (1989). Reputation Acquisition in Debt Markets. *Journal of Political Economy*, 97(4), 828–862.
- [10] Gorman, G. G., Rosa, P. J., & Faseruk, A. (2005). Institutional Lending to Knowledge-Based Businesses. *Journal of Business Venturing*, 20(6), 793–819.
- [11] Holton, S., McCann, F., Prendergast, K., & Purdue, D. (2013). Policy Measures to Improve Access to Credit for SMEs: A Survey. *Quarterly Bulletin*, 4, 91–110.
- [12] Jaffee, D., & Russell, T. (1976). Imperfect Information, Uncertainty, and Credit Rationing. *The Quarterly Journal of Economics*, 90(4), 651–666.
- [13] Le, P. N. M. (2012). What Determines the Access to Credit by SMEs?: A Case Study in Vietnam. *Journal of Management Research*, 4(4), 90–115.
- [14] Levine, R. (2004). Finance and Growth: Theory and Evidence. *NBER Working Paper Series 10766*. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Diakses dari <http://www.nber.org/papers/w10766.pdf>. Tanggal akses 7 Desember 2012.

- [15] Mahjabeen, R. (2010). On The Provision of Micro Loans - Microfinance Institutions and Traditional Banks. *Journal of Economic Development*, 35(1), 59–73.
- [16] Muravyev, A., Schaefer, D., & Talavera O., (2008). Entrepreneurs' Gender and Financial Constraints: Evidence from International Data. *Discussion Paper Series DP# 11*. Kyiv, Ukraine: Kyiv School of Economics and Kyiv Economics Institute. Diakses dari http://repec.kse.org.ua/pdf/KSE_dp11.pdf. Tanggal akses 23 November 2012.
- [17] Nuryartono, N., Zeller, M., & Schwarze, S. (2005). Credit Rationing of Farm Households and Agricultural Production: Empirical Evidence in the Rural Areas of Central Sulawesi, Indonesia. *Conference on International Agricultural Research for Development (Tropentag 2005), University of Hohenheim, Stuttgart-Hohenheim, October 11-13, 2005*. Stuttgart, Germany. Diakses dari <http://www.tropentag.de/2005/abstracts/full/419.pdf>. Tanggal akses 23 November 2012.
- [18] Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- [19] Wanjau, C. W., King'wara, R., Kinyua, A. N., Nyakang'o, E. O., Langat, L. C., & Karani, L. M. (2014). Factors Affecting Access to Credit by Small and Medium Enterprises in Microfinance Institutions in Nakuru Municipality, Kenya. *Journal of Innovative Research & Studies*, 3(1), 385–402. Diakses dari http://www.ijirs.com/vol3_issue-1/30.pdf. Tanggal akses 7 Desember 2012.
- [20] Wesaratchakit, W., Subhanij, T., Roengpitya, R., Sawangngoenyuan, W., & Sereevoravitgul, C. (2010). Financing Thailand for Balanced and Sustainable Growth. *Bank of Thailand Symposium 2010*, SP/03/2010. Supervision and Monetary Policy Group Bank of Thailand. Diakses dari https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/SymposiumDocument/Paper3_2553.pdf. Tanggal akses 23 November 2012.
- [21] Winkelmann, R., & Boes, S. (2006). *Analysis of Microdata*. Springer Science & Business Media.
- [22] Wooldridge, J. M. (2005). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. 3rd Edition. Boston: Addison Wesley.
- [23] World Bank. (1994). *Can Intervention Work? The Role of Government in SME Success*. Washington, DC: World Bank.
- [24] World Bank. (2001). *Small and Medium Enterprise (SME) World Bank Group Review of Small Business Activities - 2001*. Working Paper 23417. Washington, DC: World Bank. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/686931468765624340/pdf/multi0page.pdf>. Tanggal akses 7 Desember 2012.